



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 5, No. 2 Tahun 2022

DOI : 10.21043/politea.v5i2.17265

Pertarungan Narasi Islam dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019

Hasbi Aswar

Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
hasbiaswar@uii.ac.id

Fauzi Wahyu Zamzami

Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
fauzi.zamzami@students.uui.ac.id

Alifya Kasih Widjayanti

Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
alifya.widjayanti@students.uui.ac.id

Ahmad Priyansyah

Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
ahmad.priyansyah@students.uui.ac.id.

Abstract

The 2019 general election is one of the most intense elections in Indonesia's history, especially after reformasi (political reform) in the 1998. This election did not only involve political parties in the fight for the presidency but also involves opposition movements, especially the Islamic movement. After the phenomenon of 212 in 2016, Islamic movements became very active in influencing political activities in Indonesia, including the elections held in 2019. The efforts of this Islamic opposition movement were to delegitimize the regime (Joko Widodo) who tried to participate in the 2019 re-election through various narratives including religious narratives in it. Meanwhile, on the other hand, there are also other Islamic groups that carry out counter-narratives and support Jokowi to be re-elected in the 2019 election. This study focuses on discussing the narratives and counter-narratives carried out by Muslim opposition and pro-regime Islamic groups in the 2019 elections through narrative analysis in qualitative research. Data is collected through online

sources, both from those with affiliation with related movements and other media. This research found that there were two sides of the Islamic narrative in the 2019 presidential election, namely the Islamist side who criticized the incumbent presidential candidate and the Islamic group side who supported the presidential candidate as well as the president who was in power.

Keywords: *Islamic Narratives, Islamic Movements, Presidential Elections 2019*

Abstrak

Pemilihan umum 2019 merupakan salah satu pemilihan yang paling intens dalam sejarah Indonesia, terutama setelah reformasi (reformasi politik) pada tahun 1998. Pemilihan ini tidak hanya melibatkan partai politik dalam memperebutkan kursi presiden tetapi juga melibatkan gerakan oposisi, terutama gerakan Islam. Setelah fenomena 212 pada tahun 2016, gerakan Islam menjadi sangat aktif dalam mempengaruhi aktivitas politik di Indonesia, termasuk Pemilu yang diadakan pada tahun 2019. Upaya gerakan oposisi Islam ini adalah untuk mendelegitimasi rezim (Joko Widodo) yang mencoba untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019 melalui berbagai narasi termasuk narasi keagamaan di dalamnya. Sementara itu, di sisi lain, ada juga kelompok Islam lain yang melakukan kontra-narasi dan mendukung Jokowi untuk terpilih kembali pada Pilpres 2019. Kajian ini berfokus pada pembahasan narasi dan kontra-narasi yang dilakukan oleh kelompok Muslim oposisi dan Islam pro-rezim pada Pemilu 2019 melalui analisis narasi dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber online, baik yang berafiliasi dengan gerakan terkait maupun media lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua kutub narasi Islam dalam pemilihan presiden 2019 yakni kutub Islamis yang mengeritik calon presiden petahana dan kutub kelompok Islam yang mendukung calon presiden sekaligus presiden yang sedang berkuasa.

Kata kunci: Narasi Islam, Gerakan Islam, Pilpres 2019.

Pendahuluan

Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia memiliki corak yang sangat berbeda dibandingkan Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bukan karena pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif nasional dan daerah di waktu yang bersamaan tapi karena peran aktif gerakan Islam dan narasi – narasi Islam yang digunakan untuk saling memenangkan calon dan mendiskreditkan satu sama lain.

Sepanjang sejarah perjalanan politik Indonesia Islam memang tidak bisa lepas dari proses – proses politik yang pernah terjadi. Umat Islam adalah penganut agama mayoritas di

Indonesia dan telah berkontribusi terhadap dinamika politik di kawasan ini bahkan sebelum Indonesia merdeka. Umat Islam juga banyak berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan proses – proses politik paska kemerdekaan.

Terkait pandangan Islam dan Politik, Muslim di Indonesia berpandangan berbeda satu sama lain. Ada kalangan yang menganut paham nasionalis yang menganggap bahwa Islam dan negara tidak perlu diintegrasikan, agama semestinya memiliki ruang terpisah dengan kekuasaan. Namun, tetap akan menjadi sumber inspirasi melalui nilai – nilai yang diajarkannya. Ada pula yang meyakini bahwa Islam harus menjadi bagian dari kekuasaan. Kekuasaan menjadi sarana untuk menerapkan ajaran – ajaran Islam. Pasca reformasi gagasan integrasi Islam dan negara semakin intens sejak masuknya gagasan – gagasan politik yang dibawah oleh kelompok Islam transnasional seperti gerakan Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Pemilu tahun 2019 adalah bagian dari ajang pertarungan dari kelompok – kelompok Muslim yang memiliki keyakinan berbeda terhadap hubungan Islam dan negara.

Dalam konteks pertarungan narasi Islam dalam pemilihan presiden tahun 2019, berbagai kajian bermunculan untuk menganalisis fenomena maraknya kelompok Islam dan narasi yang mereka bawa masing – masing untuk mendukung masing – masing pasangan calon. Seperti, Sihidi, Roziqin, dan Suhermanto (2020) yang mengamati fenomena itu dalam perspektif populisme, Sihidi, et.al, menjelaskan bahwa pemilihan presiden di tahun 2019 merupakan panggung di mana populisme islam dijadikan suatu alat untuk mencari suara. Berbagai narasi dimainkan dalam kampanye guna menarik perhatian masyarakat seperti Jokowi dan Ma'ruf Amin yang menggunakan narasi kampanye yang berfokus pada Islam Nusantara dan isu pluralisme sedangkan Prabowo dengan narasi kampanye yang lebih bersifat islam konservatif (Sihidi et al., 2020).

Dalam konteks pertarungan narasi antar kelompok Islam, Dian Dwi Jayanto (2019) mengkaji pertarungan narasi antara Gerakan Nasional Pembela Fatwa-Ulama (GNPF - Ulama) dan Nahdlatul Ulama untuk merebut wacana populisme Islam di Indonesia dalam konteks kontroversi isu penistaan agama tahun 2016. GNPF menggunakan narasi keummatan sementara NU menggunakan narasi keumatan dan nasionalisme atau kebangsaan. Tapi kemampuan GNPF untuk membangun narasi dengan mengatasnamakan

penistaan agama membuat kontranarasi yang dilakukan oleh pimpinan Nahdlatul Ulama tidak efektif untuk membendung massa yang dipimpin oleh GNPF misalnya dalam aksi – aksi yang dilakukan seperti aksi 2 Desember 2016 (Jayanto, 2019).

Kajian terhadap partai politik Islam dan pemilu tahun 2019 dilakukan oleh Addiansyah (2019) yang menganalisis faktor – faktor penyebab koalisi partai Islam dalam pemilihan presiden. Dengan perolehan suara yang dimiliki, partai – partai Islam harus berkoalisi dengan partai – partai nasionalis. Koalisi ini menurut penulis bukanlah berangkat dari kepentingan ideologis karena memang ideologi partai – partai Islam sudah kabur dan tidak bisa dibedakan dengan partai – partai nasionalis. Koalisi partai terjadi lebih pada kepentingan pemenangan pemilu dengan hitung – hitungan potensi kemenangan dan bagi – bagi kekuasaan (Addiansyah, 2019).

Tulisan ini akan fokus pada kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 dan keterlibatan kelompok – kelompok Islam untuk memenangkan masing - masing calon dan mendiskreditkan yang lain melalui narasi atau simbol Islam masing - masing. Kajian ini menggunakan analisis naratif untuk memahami dan menganalisis narasi kelompok – kelompok Islam dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data yang diakses melalui studi literatur baik dari buku, jurnal, liputan media, maupun sumber – sumber resmi milik partai politik dan organisasi Islam yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep gerakan dan kontra - gerakan (*movement & countermovement*) dalam studi gerakan sosial. Konsep ini menjelaskan bahwa sebuah gerakan sosial akan memunculkan respon perlawanan dari gerakan lain yang akan muncul untuk menandinginya. Biasanya gerakan tandingan atau kontra - gerakan ini akan muncul saat melihat sebuah gerakan tertentu mencapai sebuah kesuksesan dalam tahap perjuangannya. Sehingga hubungan antara sebuah gerakan dan kontra - gerakan akan saling berkonflik dan berkompetisi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan (Porta & Diani, 2006: 211).

Menurut Zald dan Useem (1983) hubungan konflik antara gerakan dan kontra - gerakan bisa terbagi dalam beberapa bentuk seperti: pertama, kedua belah pihak dapat bertemu dan berdebat di berbagai tempat seperti di jalan, di ruang public dan di tempat – tempat demonstrasi atau protes. Kedua, Kedua belah pihak juga bersaing satu sama lain untuk meraih dukungan dari publik dan kekuasaan dengan berbagai upaya. Dan ketiga, kedua belah pihak akan saling bersaing untuk saling menghambat satu sama lain agar kelompok lawan menjadi gagal, tidak efektif atau bahkan berhenti (Zald & Useem, 1983: 10-12). Dalam konteks penelitian ini, gerakan Islam pendukung calon Presiden Prabowo Subianto sebagai gerakan (*movement*) dan gerakan Islam pendukung calon presiden Joko Widodo berada diposisi kontra - gerakan (*countermovement*). Sementara fokus hubungan konflik yang akan diulas dalam tulisan ini adalah upaya kedua belah pihak untuk mempengaruhi opini publik untuk memenangkan narasi serta memenangkan calon masing - masing dalam pemilihan presiden tahun 2019.

Narasi Kelompok Islam Pendukung Prabowo Subianto

Koalisi gerakan Islam untuk menhadang pencalonan Joko Widodo dalam pemilihan umum 2019 berakar pada Gerakan Anti-Ahok 2016 yang menciptakan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF-MUI). Gerakan berisi koalisi tokoh dan kelompok – kelompok Islamis seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, dan Forum Umat Islam – (FUI) yang telah pernah berhasil melakukan protes besar dan memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2017 melalui isu penodaan agama. Gerakan ini tidak berhenti dalam isu penodaan agama saja, tapi tetapi juga terus merongrong kekuasaan Presiden Joko Widodo yang dianggap memihak dan selalu melindungi Ahok.

Koalisi ini melakukan banyak aktifitas untuk mengeritik dan berupaya mendiskreditkan Joko Widodo menjelang pemilihan presiden tahun 2019. Diantara kegiatannya adalah mengadakan Ijtima Ulama; berkontribusi pada kampanye politik Prabowo dan Sandi; dan menerbitkan lagu yang mencoba menurunkan popularitas calon petahana Jokowi – Ma`ruf. Kegiatan tersebut dilakukan melalui narasi karakter rezim Joko Widodo yang anti-Islam dan rezim yang gagal mengatur rakyat Indonesia.

Ijtima Ulama digelar selama tiga kali. Yang pertama dan yang kedua diadakan berturut – turut tahun 2018 untuk memberikan dukungan pada Prabowo – Sandi. Melalui ijtima ini dukungan dari para ulama dan mubaligh berdatangan seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan AA Gym (KH. Abdullah Gymnastiar). Melalui ijtima ini pula ditanda tangani pakta integritas antara koalisi Muslim di Ijtima Ulama dan Prabowo Subianto antara lain menjamin kepulungan Habib Rizieq Shihab, menghormati cendekiawan muslim, dan menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia (R Antares P, 2019).

Dari sisi narasi yang dilemparkan ke publik Indonesia, secara umum, gerakan-gerakan politik Islam yang menentang pemerintahan Jokowi berada dalam barisan gerakan nasional pembela fatwa yang kemudian menjadi PA 212 (Presidium Alumni 212). Narasi utama yang dimainkan adalah kegagalan rezim Jokowi selama menjadi pemimpin; rezim Jokowi merupakan pemerintahan yang memberikan kesempatan bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bangkit kembali, membiarkan peningkatan pengaruh Cina dalam ekonomi nasional serta merupakan rezim yang seringkali melakukan kriminalisasi terhadap para ulama khususnya yang berdiri sebagai pihak oposisi. Sementara, Prabowo dipandang sebagai figur yang tepat menggantikan Jokowi karena ia hadir sebagai tokoh yang patuh dan selalu mempertimbangkan suara para ulama dari kelompok ini (JM, 2019).

Penyebaran narasi anti-Cina dalam sejarah Demokrasi Indonesia bukan pertama kali terjadi pada pemilihan presiden 2019. FPI mengusung narasi yang sama dalam mendukung pasangan Anies-Sandi yang maju di pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Sentimen anti-China digunakan untuk menghadapi calon gubernur petahana yang merupakan etnis China beragama Kristen, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Pada saat itu, ajakan untuk memilih calon gubernur Muslim terdengar keras di masjid-masjid pada saat khotbah Jumat sebagai media propaganda kepada para pemilih muslim, bahkan terdapat narasi yang menyeru untuk melarang menyolatkan jenazah pemilih calon gubernur non-muslim (Kompas TV, 2017).

Penggunaan narasi anti-China dan pemimpin non-muslim pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lebih mudah dilakukan karena menjelang akhir tahun 2016, tersebar video Ahok melecehkan Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam sebuah pidatonya yang diambil pada 31 Maret 2016. Tuduhan melecehkan Al-Qur'an yang ditujukan kepada Ahok

membuat geram berbagai kalangan umat Islam yang menghasilkan kecaman dan tuntutan minta maaf dari berbagai kalangan umat Islam. Hal ini berlanjut dengan adanya aksi 411 dan 212 di akhir 2016 diinisiasi oleh kalangan umat Islam yang merasa geram terhadap dengan Ahok (Kompas TV, 2017; Larissa, n.d.).

Gerakan 212 dinilai menjadi cikal-bakal hadirnya gerakan oposisi Islam di Pilpres 2019. Gerakan yang diawali pada tahun 2016 ini terus berlanjut hingga menjelang pemilihan presiden tahun 2018 dan menjadi ajang untuk mengkritisi kepemimpinan presiden Joko Widodo dan menyerang rencananya untuk menjadi calon petahana dalam Pilpres tahun 2019. Salah satu narasi yang muncul misalnya adalah saat Habib Rizieq pada reuni 212 menyampaikan untuk tidak mendukung pemimpin atau calon pemimpin (Joko Widodo) yang didukung oleh partai pengusung penista agama dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017. Di forum 212 tahun 2018 juga, Rizieq mengajak masyarakat untuk memilih Prabowo Subianto dan wakilnya Sandi Uno yang dianggap sosok yang telah disepakati dalam forum ijma ulama. ndukung penista agama (Persada, 2018).

Penggunaan symbol – symbol Islam juga digunakan oleh para oposisi Muslim melalui terciptanya lagi 2019 Ganti Presiden. Lagu ini dinyanyikan oleh tokoh – tokoh nasional dan selebriti yang bersebrangan dengan presiden Jokowi seperti dari kalangan politisi, Amien Rais, Mardani Ali Sera, Fadli Dzon. Dari kalangan aktifis Islam seperti Neno Warisman, Derry Sulaiman dan Haikal Hassan Baras dan dari kalangan selebriti dan aktifis yaitu Ahmad Dhani dan John Sang Alang.

Lagu ini menjadi sangat populer karena dikemas dengan professional Bersama video klipnya. Lagu Terdapat berbagai kritikan yang disematkan kepada Jokowi di dalam lirik lagu tersebut seperti kritikan terhadap janji Jokowi yang hendak membuka 10 juta lapangan kerja namun malah memberikan akses masuk yang mudah bagi para tenaga kerja asing Lagu tersebut tidak lupa menyoroti naiknya tarif dasar listrik (TDL), harga kebutuhan pokok, BBM yang sering terjadi di tengah malam buta hingga harga pajak di tengah-tengah kesengsaraan rakyat pun ikut disoroti (Amelia R, 2018). Lagu ini juga menyiratkan tuduhan anti-islam kepada Jokowi dengan menyindirnya sebagai presiden yang mengkriminalisasi ulama melalui lirik “Bukan presiden yang suka memenjarakan ulama Dan rakyatnya” (2019 Ganti Presiden, 2018).

Selain itu, kelompok oposisi Islam juga menggunakan isu PKI (Partai Komunis Indonesia) dalam usaha melengserkan legitimasi Jokowi pada pilpres 2019. Hal ini terlihat dari tuduhan kedekatan Jokowi dan PKI yang disematkan oleh imam besar FPI, Habib Rizieq, dalam bukunya berjudul “PKI, Apa dan Bagaimana” yang dibagikan dalam. Buku tersebut memuat sebuah ulasan dalam satu halaman khusus dengan judul “Jokowi dan PKI”. Buku ini juga pernah dibagikan di acara doa bersama untuk bangsa di Monumen Nasional (Monas) Jakarta 29 September 2018 (Tumanggor, 2017).

Narasi – narasi dengan menggunakan symbol – symbol Islam untuk mendiskreditkan pasangan calon petahana Joko – Widodo dan Ma`ruf Amin diulang – ulang di berbagai kesempatan khususnya oleh para tokoh Islam dan kelompok - kelompok Muslim yang tergabung dalam persatuan alumni 212. Baik dalam acara kampanye formal pasangan calon maupun dalam kegiatan – kegiatan reuni 212 sejak tahun 2018 sampai menjelang pemilihan presiden tahun 2019. Habib Rizieq adalah tokoh utama yang menjadi pemimpin dari kelompok oposisi Muslim ini dan selalu menjadi orator utama yang mengajak umat Islam untuk mendukung Prabowo dan menjauhi Joko Widodo. Dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno pada April 2019, Habib Rizieq melalui fasilitas daring menyampaikan bahwa Prabowo patut didukung karena ia adalah merupakan pasangan capres-cawapres hasil ijtima’ ulama; Prabowo-Sandi setia kepada Pancasila dan UUD 1945 yang sejati untuk membela agama, bangsa dan negar; Prabowo-Sandi menandatangani pakta integritas di hadapan para habaib dan ulama yang menghadiri ijtima’ ulama, cinta dan hormat kepada ulama serta menolak dan menentang kriminalisasi terhadap ulama dan tidak memusuhi agama Islam maupun agama yang lainnya (Wani TV, 2019).

Narasi Kelompok Islam Pendukung Jokowi

Menghadapi gejolak politik yang memanas sejak tahun 2016 dengan isu penistaan agama, presiden Joko Widodo tidak tinggal diam dan hanya melihat peristiwa tersebut namun, pemerintahan Joko Widodo mengibarkan bendera perlawanan dengan mengangkat isu Indonesia dan Pancasila terancam oleh isu dan gerakan intoleran. Setelah itu, tagline saya Indonesia, saya Pancasila digaungkan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk sebagai badan untuk melindungi ideologi Pancasila. Dan pemerintah memperketat para

pegawai negeri sipil, aparat polisi dan tentara agar tidak terjebak dalam paham – paham radikal. Ormas radikal, Hizbut Tahrir Indonesia, juga dibubarkan pada tahun 2017 karena dianggap memiliki paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta mengancam stabilitas keamanan berbangsa dan bernegara.

Menghadapi serangan – serangan narasi para oposisi Muslim khususnya yang bernaung dalam persaudara alumni 212 atau gerakan nasional pembela fatwa ulama (GNPF – MUI), calon petahan Joko Widodo menggandeng Ma`ruf Amin yang sebelumnya menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia untuk menjadi calon presiden dalam pilpres 2019. Para pengamat menyimpulkan bahwa dengan menggandeng Ma`ruf Amin, Jokowi bisa mengamankan suara Nahdlatul Ulama dan para pendukungnya untuk berada di pihak Joko Widodo serta menahan potensi serangan – serangan politik dari gerakan – gerakan oposisi Muslim yang selama ini telah banyak menyerang presiden Joko Widodo (jpnn, 2018).

Koalisi ini berdampak besar untuk menarik dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma`ruf para habib, santri, dan tentunya ormas Nahdlatul Ulama. Data Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada bulan Februari 2019 menunjukkan bahwa, elektabilitas Jokowi-Ma`ruf dalam kelompok Islam NU adalah sebesar 64,1% yang mana meningkat sebanyak 8,5% dari bulan Januari yang tercatat sebesar 55,6%. Sebaliknya dukungan NU terhadap Prabowo turun dari 33,6 persen per Januari 2019 menjadi 28,2 persen pada Februari 2019. (Wijanarko, 2019).

Dukungan kelompok Islam terhadap Jokowi juga ditunjukkan dengan adanya 14 perwakilan ormas islam di bawah Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang kemudian menyatakan dukungannya terhadap Jokowi-Maruf secara langsung di Istana Negara. LPOI mendukung Jokowi karena mengangkat ulama, Ma`ruf Amin, sebagai wakilnya. Jokowi juga dinilai pemimpin yang taat dan selalu mementingkan umat Islam. Jokowi dalam berbagai program keislaman, hingga keberpihakan Jokowi terhadap Islam yang ditunjukkan dengan pemberian posisi penting negara kepada ulama. 14 perwakilan ormas yang dimaksud ialah LPOI, Syarikat Islam Indonesia, Al Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Ittihadiyah, HBMI, Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Mathla'ul Anwar, IKADI, Al Irsyar Al Islamiah, Persatuan, Islam dan juga

Nahdlatul Ulama (CNN Indonesia, 2019d).

Tak hanya datang dari ormas, namun pendukung Jokowi-Ma'ruf juga datang dari barisan Gus dan Santri Bersatu yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Gus dan Santri Bersatu yang jumlahnya puluhan orang kemudian menyerukan akan senantiasa mendukung yang mengerahkan anggotanya untuk melakukan sosialisasi *door to door* sebagai wujud dukungan terhadap pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Selain melakukan sosialisasi, kelompok ini juga akan memanfaatkan jaringan alumni dan santri dari pesantren yang ada di Indonesia, khususnya pulau Jawa (CNN Indonesia, 2019a).

Salah satu Habib yang turut serta memberikan dukungannya terhadap Jokowi-Ma'ruf ialah Habib Ahmad Ja'far dengan alasan bahwa Jokowi yang memilih Ma'ruf sebagai pasangannya adalah kedua orang amanah dimana dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang taat pada syariat tanpa adanya Khilafah. Alasan yang diberikan oleh Habib Ahmad Ja'far kemudian juga selaras dengan narasi kampanye Jokowi Ma'ruf yang menekankan akan pentingnya menjaga kedaulatan negara dengan menerapkan prinsip yang telah ada di dasar negara, Pancasila.

Jokowi dan Ma'ruf amin adalah pasangan calon yang fokus terhadap penanganan sikap radikalisme, anti-Pancasila dan anti NKRI di Indonesia. Sikap ini senantiasa ditunjukkan kedua pasangan baik sebelum kampanye ataupun semasa kampanye, dimana Jokowi tiada hentinya menyerukan sikap tegas terhadap organisasi atau gerakan yang dinilai akan berpotensi menghancurkan ideologi bangsa. Kebhinekaan Indonesia menurut Jokowi senantiasa diuji oleh sikap yang dinilai tidak toleran dan mencoba mengubah ideologi negara sesuai keinginannya. Sikap tersebut kemudian semakin diperparah dengan penggunaan media sosial sebagai wadah meletakkan ujaran kebencian terhadap ideologi bangsa yang berpotensi memecah belah umat. Pancasila dinilai sebagai hal yang membuat Indonesia menjadi panutan masyarakat internasional akan tatanan kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal positif tersebut kemudian perlu dipertahankan dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kemudian menjaga persatuan bangsa dan menjaga Pancasila. Selain mengajak turut serta masyarakat, pemerintah kemudian menyatakan sikap tegasnya terhadap organisasi atau Gerakan anti Pancasila, Anti NKRI, maupun Anti Bhinneka Tunggal Ika dan senantiasa menyampaikan kepada masyarakat

Indonesia untuk saling menghormati dan bersikap toleransi terhadap perbedaan yang ada di Indonesia (SetkabRI, 2017).

Dalam narasi kampanyenya, Jokowi senantiasa menegaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan Islam toleran, modern dan berpikir panjang. Penegasan Jokowi akan Islam di Indonesia yang bersifat moderat dan modern ini dilakukannya guna menghalau tuduhan akan peningkatan fundamentalism yang ada di Indonesia. Narasi Moderat ini ditunjukkan oleh Jokowi dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa bersama memajukan negara bukan sebaliknya melakukan penghancuran ideologi negara Islam Moderat seringkali digunakan meskipun isu intoleransi cenderung meningkat. Jokowi yang mengedepankan Islam Moderat juga kemudian menegaskan tidak memberikan ruang sama sekali terhadap terorisme dan radikalisme (CNN Indonesia, 2019c).

Islam toleran yang digunakan dalam narasi Jokowi bukanlah gagasan yang baru dibuat sesaat Pemilu. Hal tersebut ditunjukkan dengan Jokowi yang sebelumnya membuka Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia tentang Islam Wasathiyah atau Islam Jalan tengah pada tanggal 1 Mei 2018. Dalam pertemuan tersebut Jokowi kemudian dengan tegas menyatakan posisi Indonesia yang mendorong lahirnya poros Wasathiyah Islam dunia. Jokowi juga mengajak para tokoh Islam lainnya untuk senantiasa meningkatkan perdamaian dan persatuan dunia, hal ini dikarenakan banyaknya ujaran kebencian hingga radikalisme yang meluas di masyarakat. Hal tersebut kemudian didukung oleh Ahmad Muhammad At-Thayeb yang merupakan pembicara dalam pembukaan KTT Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia dengan mengatakan bahwa agama Islamlah yang seharusnya menjadi penengah dan tidak bertindak ekstrim dikarenakan hal itu bukanlah hal yang baik dan akan berakibat pada pecahnya umat muslim dikarenakan konflik yang tak kunjung surut dikarenakan tindakan ekstrim tersebut (Waluyo, 2018).

Islam moderat yang dikedepankan dalam narasi politik Jokowi kemudian diperkuat dengan Jokowi yang mengangkat Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia serta Rais Aam Syuriah Nahdlatul Ulama yang disebutkan oleh Jokowi sebagai salah satu muslim yang moderat. Pemilihan Ma'ruf Amin selain bertujuan untuk menghilangkan tuduhan anti-Islam yang kerap digaungkan beberapa pihak kontra dari

Jokowi itu sendiri juga dikarenakan Ma'ruf Amin yang dinilai sebagai tokoh agama yang bijaksana dan posisi Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang saat itu ditempatinya menunjukkan keduanya memiliki misi yang sama dalam melindungi ideologi negara Indonesia (BBC News Indonesia, 2018).

Jokowi yang mengedepankan islam moderat dalam narasinya menggambarkan pendukungnya ialah kelompok Islam yang dapat berbaur dengan pemeluk agama lain, menerima adanya kegiatan agama lain, mendukung pembangunan rumah ibadah, dan berbagai aksi toleransi yang mengakui keberadaan bhineka tunggal Ika dan menjunjung tinggi Pancasila. Jokowi Widodo ingin masyarakat menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika dengan senantiasa mengedepankan prinsip Islam yang moderat. Dalam peringatan Hari Lahir ke-73 Muslimat NU kemudian Jokowi mengajak masyarakat untuk senantiasa menggaungkan islam moderat (CNN Indonesia, 2019b).

Dalam debat putaran pertama yang mengusung gagasan politik, hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Pasangan Jokowi-Ma'ruf mengisinya dengan pernyataan akan membuat berbagai program yang kontra akan radikalisme hingga terorisme. Program pencegahan terorisme dan tindakan radikalisme akan dilakukan dengan memperhatikan berbagai sektor yang bukan hanya dalam pendekatan hukum namun juga sektor ekonomi hingga sosial budaya. Hal tersebut dilakukan ialah karena tindakan terorisme dan aksi radikalisme bukan hanya merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum saja melainkan ada masalah lain yang merupakan suatu alasan dilakukannya aksi terorisme hingga radikalisme tersebut.

Narasi seputar radikalisme tidak hanya digaungkan oleh Joko Widodo melainkan juga oleh Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin kemudian berjanji untuk senantiasa menggalakkan kegiatan deradikalisasi terhadap anak-anak dan perempuan sebagai wujud dari pencegahan berkembangnya radikalisme di Indonesia. Hal tersebut kemudian dilakukan secara menyeluruh mengingat radikalisme di Indonesia tentu memiliki penyebab yang harus dihilangkan. Langkah konkrit yang dilakukan ialah dengan memperbaiki segala aspek mulai dari memperhatikan Pendidikan di Indonesia, jalur keagamaan, hingga jalur aparatur sipil negara agar senantiasa terhindar dari paparan radikalisme. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama menangani permasalahan radikalisme di Indonesia, untuk itu hal yang perlu dilakukan ialah memperdalam wawasan kebangsaan yang harus dipahami sejak dini

agar tidak terprovokasi dengan ideologi lainnya. Ma'ruf juga menekankan bahwa orang muslim di Indonesia sudah semestinya berupaya untuk terhindar dari sikap radikal dan intoleran mengingat keislaman dan keindonesiaan sudah menjadi suatu kesatuan dalam diri masyarakat muslim di Indonesia.

Narasi seputar terorisme juga tak luput dari bahasan Ma'ruf Amin. Hal tersebut ditunjukkan dengan Ma'ruf Amin yang berpendapat bahwa terjadinya terorisme dikarenakan adanya perlakuan tidak adil hingga ada yang salah dalam memahami ilmu agama yang mana penanganannya perlu disesuaikan dengan sebab terjadinya terorisme tersebut. Salah paham terhadap pemahaman agama kemudian menjadi alasan di gaungkannya Islam *Wasatiyyah* dimana juga menjadi fokus utama Jokowi dan Ma'ruf dalam kepemimpinannya.

Gagasan Islam moderat dan anti radikalisme adalah narasi yang menjadi titik kesepahaman antara NU dan pemerintahan Joko Widodo. Saat tensi politik identitas meningkat tahun 2016, terlihat pengurus NU berada disisi pemerintah untuk menstabilkan kondisi masyarakat bahkan mencegah keterlibatan para anggotanya untuk ikut dalam gerakan yang dipimpin oleh GNPF saat itu. NU juga bersama Banser dan GP Anshor mendukung pemerintah dalam membubarkan HTI yang dianggap ormas radikal anti Pancasila. Kesamaan komitmen inilah yang menjadikan kedua entitas ini akhirnya berkoalisi untuk berkontestasi dalam pilpres 2019.

Joko Widodo akhirnya tidak salah pilih di saat mengangkat Ma'ruf Amin menjadi calon presidennya. Kedua pasangan calon ini akhirnya memenangkan pemilihan presiden tahun 2019 dengan perbandingan Pasangan Joko Widodo – Maruf Amin mendapatkan 85.607.362 suara atau 55,50%. Sementara, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh suara sebesar 68.650.239 atau 44,50% (Bayu, 2019). Artinya bahwa, pertarungan narasi dan simbol – simbol Islam yang dibawa oleh kedua calon ini melalui pendukungnya masing – masing telah dimenangkan oleh calon petahana.

Faktor dominasi PDI-P di pulau Jawa, dan faktor Nahdlatul Ulama menjadi penentu utama kemenangan Joko Widodo. Nahdlatul Ulama adalah ormas terbesar di Indonesia dengan jumlah pengikut 80 – 90 juta orang dengan ribuan pesantren beserta santri dan para kyai nya (Triono, 2021). Selain itu, nahdlatul ulama juga dikenal sebagai ormas historis

yang telah berjuang sejak awal kemerdekaan dengan gagasan Islam moderat dan Islam Nusantara yang selalu diperjuangkannya. Karakter NU ini sejalan dengan karakter mayoritas masyarakat Indonesia yang juga moderat dengan karakter tidak ingin membenturkan Islam dan Pancasila dan tidak mendukung formalisasi negara Islam di Indonesia (Sasmito Madrim, 2019).

Kesimpulan

Pemilihan presiden tahun 2019 menjadi salah satu catatan sejarah politik di Indonesia dimana Islam menjadi variable penting yang berperan di dalamnya. Islam menjadi pemain penting dalam politik 2019 bermula dari gerakan 212 yang muncul saat merespon isu penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2016. Gerakan ini dimotori oleh berbagai tokoh dari Majelis Ulama Indonesia termasuk gerakan seperti Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia. Setelah gerakan ini berhasil memenjarakan Ahok dan mengalahkannya dalam pemilihan gubernur 2017, gerakan ini juga ikut bermain dalam level politik nasional yakni dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif tahun 2019. Isu yang diangkat dalam pilpres ini bukan hanya berkaitan dengan kritik terhadap presiden Joko Widodo sebagai calon *incumbent* atau petahana tapi juga kedekatan dengan Cina dan komunisme serta kedekatan dengan Ahok sebagai penista agama. Kelompok Islam yang menolak Jokowi umumnya berlatar yang sama dengan para pendukung gerakan 212 seperti dari FPI, FUI dan GNPF. Para oposisi Islam ini juga kecenderungannya mendukung lawan Jokowi yaitu Prabowo Subianto. Disisi yang lain, Jokowi dan para pendukungnya juga menggunakan narasi Islam untuk memenangkan Jokowi. Gerakan pro Jokowi ini dipimpin oleh barisan Nadhlatul Ulama dan para tokohnya.

Narasi utama dukungan terhadap Jokowi adalah kepedulian Jokowi terhadap gagasan Islam moderat dan ketegasan Jokowi kepada kelompok Islam radikal seperti pembubaran HTI. Melihat aktifitas gerakan baik kalangan muslim yang pro dan kontra Jokowi, gerakan yang kontra terlihat lebih antusias dalam memenangkan calon mereka dengan berbagai Langkah yang mereka lakukan baik Langkah konsolidasi, menggunakan mimbar ceramah, media sosial, bahkan termasuk membuat lagu untuk mendelegitimasi

atau menjatuhkan popularitas petahana yakni pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin.

Hasil dari pertarungan antara dua gerakan Islam ini dimenangkan oleh barisan Joko Widodo dan Nahdlatul Ulama. Kemenangan ini adalah hasil dari beberapa faktor pendukung seperti gagasan moderat NU dan karakter moderat mayoritas rakyat Indonesia, dan Dominasi PDI – P di pulau Jawa. Dari sini dapat dilihat bahwa, gerakan oposisi Islam yang mengangkat symbol – symbol Islam untuk menghantam rezim Joko Widodo belum berhasil meyakinkan mayoritas masyarakat Indonesia terlebih gerakan – gerakan yang menjadi motor oposisi adalah yang selama ini dianggap kontroversial di Indonesia.

Daftar Pustaka

- 2019 Ganti Presiden. (2018, June 8). *Video Lirik 2019 Ganti Presiden #2019GantiPresiden*. <https://www.youtube.com/watch?v=8vM30O9U3Bs>
- Addiansyah, M. N. R. (2019). Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis. *Politea*, 2(2), 189.
<https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.6016>
- al Qurtubi, S. (2017). *Manipulasi Agama dalam Pilkada Jakarta*. DW.COM.
<https://www.dw.com/id/manipulasi-agama-dalam-pilkada-jakarta/a-38379477>
- Amelia R, M. (2018). *Lagu #2019GantiPresiden Dirilis, Begini Liriknya*. detiknews.
<https://news.detik.com/berita/d-4029541/lagu-2019gantipresiden-dirilis-begini-liriknya>
- Bayu, D. J. (2019). *Hasil Rekapitulasi KPU: Jokowi-Ma'ruf Menangkan Pilpres 2019— Nasional Katadata.co.id*.
<https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5e9a518b1a13e/hasil-rekapitulasi-kpu-jokowi-maruf-menangkan-pilpres-2019>

- BBC News Indonesia. (2018). Wawancara khusus Wapres Ma'ruf Amin: 'Aparat sipil negara harus steril dari radikalisme'. *BBC News Indonesia*.
<https://www.bbc.com/indonesia/50259907>
- CNN Indonesia. (2019a). *Barisan Gus dan Santri Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf nasional*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190108074237-32-359183/barisan-gus-dan-santri-deklarasi-dukung-jokowi-maruf>
- CNN Indonesia. (2019b). *Jokowi Ingin Islam Moderat Terus Digaungkan di Indonesia*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190127111938-32-364172/jokowi-ingin-islam-moderat-terus-digaungkan-di-indonesia>
- CNN Indonesia. (2019c). *Jokowi Tegaskan Islam di Indonesia Toleran dan Moderat*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190728095009-20-416164/jokowi-tegaskan-islam-di-indonesia-toleran-dan-moderat>
- CNN Indonesia. (2019d). *Said Aqil: 14 Ormas Islam Doakan Jokowi Menang*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190123033201-32-362991/said-aqil-14-ormas-islam-doakan-jokowi-menang>
- Jayanto, D. D. (2019). *Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU)*. 29(1), 1–25.
- JM, F. R. (2019). *Populisme islam dalam demokrasi yang diretas*.
https://lpm.uinkhas.ac.id/download/file/fathur_rohman.pdf
- jpnn. (2018). *Pengamat: Lima Alasan Jokowi Pilih Ma'ruf Amin jadi Cawapres—Pilpres di Politik JPNN.com*. <https://www.jpnn.com/news/pengamat-lima-alasan-jokowi-pilih-maruf-amin-jadi-cawapres>
- Kompas TV. (2017). *Aksi 411 dan 212 Jadi Sorotan di Penghujung 2016—YouTube*.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZWGRm8dbH4E>
- Larissa, Destranita. (n.d.). *Dianggap Lecehkan Ayat Al-Quran, Ahok Dituntut Minta Maaf—Nasional Tempo.co*. Retrieved 8 December 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/810788/dianggap-lecehkan-ayat-al-quran-ahok-dituntut-minta-maaf>
- Persada, S. (2018, December 2). *Rizieq Shihab Serukan Peserta Reuni 212 Pilih Capres Ijtima Ulama*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1151544/rizieq-shihab-serukan-peserta-reuni-212-pilih-capres-ijtima-ulama>
- Porta, Donatella Della & Mario Diani. (2006). *Social Movements: an Introduction. second edition*. Australia: Blackwell Publishing
- R Antares P. (2019). *Perjalanan Ijtima Ulama 1 Sampai Ijtima Ulama 3 | Tagar*.
<https://www.tagar.id/perjalanan-ijtima-ulama-1-sampai-ijtima-ulama-3>

- Sasmito Madrim. (2019). *Survei Parameter: Mayoritas Masyarakat Indonesia Moderat*.
<https://www.voaindonesia.com/a/survei-parameter-mayoritas-masyarakat-indonesia-moderat-/5187371.html>
- SetkabRI. (2017). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia / Presiden Jokowi: Pemerintah Pasti Tegas Terhadap Organisasi dan Gerakan Anti Pancasila*.
<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-pemerintah-pasti-tegas-terhadap-organisasi-dan-gerakan-anti-pancasila/>
- Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Suhermanto, D. F. (2020). Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 174–189.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8516>
- Triono, A. L. (2021). *Survei: Jumlah Besar Nahdliyin Punya Bobot Politik Strategis*.
<https://www.nu.or.id/nasional/survei-jumlah-besar-nahdliyin-punya-bobot-politik-strategis-WyiQQ>
- Tumanggor, F. (2017, December 23). *FPI Fitnah Jokowi dengan Isu PKI, Seknas Jokowi Minta Kapolri Bertindak*. TAGAR. <https://www.tagar.id/fpi-fitnah-jokowi-dengan-isu-pki-seknas-jokowi-minta-kapolri-bertindak>
- Waluyo, A. (2018). *Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Bangun Poros Islam Jalan Tengah*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-tegaskan-komitmen-indonesia-bangun-poros-islam-jalan-tengah/4373774.html>
- Wani TV. (2019, April 20). *Pidato Habib Rizieq Dari Mekkah Saat Kampanye Akbar Prabowo Sandi di GBK*. <https://www.youtube.com/watch?v=690MZjHaSTA>
- Wijanarko, T. (2019, March 5). *LSI Denny JA: Dukungan NU ke Jokowi Naik, Muhammadiyah Turun*. Tempo. <https://pilpres.tempo.co/read/1182130/lisi-denny-ja-dukungan-nu-ke-jokowi-naik-muhammadiyah-turun>
- Zald, Mayer N & Useem Bert. (1983, October). *Movement and Countermovement: Loosely Coupled Conflict*. CRSO Working Paper, Center for Research on Social Organization, University of Michigan.